

GOVERNING PEMERINTAH DESA
*(Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa) Desa Wisata Di Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen,
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI



Disusun Oleh:

AGUSTINUS SUKARNO
17520252

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2021

i



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 8 Oktober

Pukul : 09.30 WIB

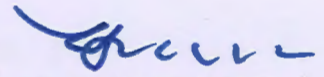
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

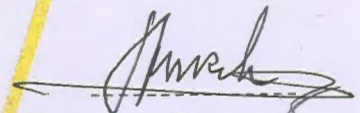
Nama

Tanda Tangan

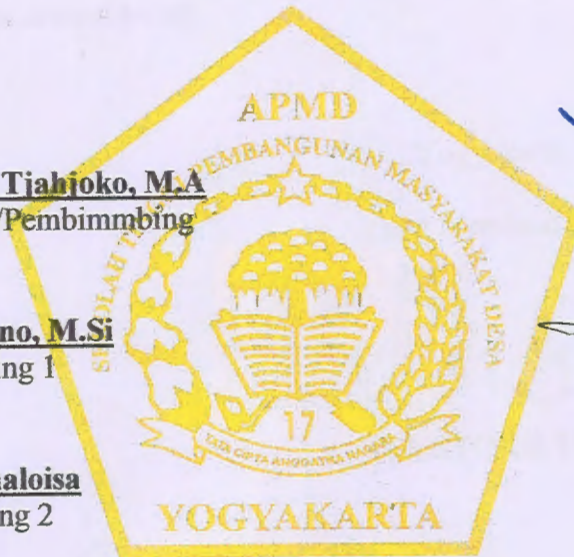
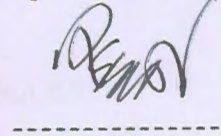
1. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A
Ketua Penguji/Pembimbing



2. Drs. Sumarjono, M.Si
Penguji Samping 1




3. Dr. Rijel Samaloisa
Penguji samping 2



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustinus Sukarno

NIM : 17520252

Program Studi : Ilmu-Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Governing Pemerintah Desa (Studi Deskriptif Kualitatif Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Wisata Di Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 2021

Yang Membuat Pernyataan



AGUSTINUS SUKARNO

MOTTO

“Dan saat engkau menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya bersatu padu
membantumu meraihnya”

~Paulo Coelho~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan cinta-Nya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini. Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya: Bapak Kampianus Jebarus dan Ibu Wihelmina Sesam.
Terimakasih untuk cinta dan kasih yang tanpa batas yang saya terima.
2. Untuk keempat saudari saya, yang selalu menghidupi mimpi yang sama, cinta kalian sangat luar biasa.
3. Untuk keluarga besar Lungar, Mucu dan Ncamar yang telah mendukung saya selama ini.
4. Untuk dosen pembimbing saya Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. yang dengan setia membantu dan membimbing saya dalam penyelesaian karya ini.
5. Untuk ‘kalian semua’ yang pernah hadir terlebih khusus teman sekaligus sahabat saya Felisanai Avelina Rosniarsi yang selalu setia memberikan cinta kasih dengan suportnya selama ini.
6. Untuk almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta, yang telah memberikan diri untuk mendidik dan berdinamika dengan ketulusan dan keiklasan.
7. Untuk kae Ernest, Kae Yudi, Kae Cris, dan Kae Jeri yang telah membantu penulis dengan berbagai macam bantuannya. Tuhan tidak menutup mata untuk membalas semua kebaikannya selama ini.

8. Untuk senior Manggarai APMD Yogyakarta. Kae Ernes, Kae Frumen, Kae Gusti, Kae Kris, Kae Olan, dan kae-kae yang lain. Terimakasih telah membimbing, dan berbagi ilmu selama ini. Semoga Tuhan memberkati atas jasa dan kebaikan dari kae-kae semua.
9. Untuk saudara-saudara saya pasukan Kost Kuning, Wiloss, Acik, Lius, Anwar, Ergin. Terimakasih untuk semuanya.
10. Untuk keluarga dari Pocoleok Jogja; Ensa, Erik, Wilos, Ferlan, Klau, Fidel, Hilla Roy, dan kedua adik ganteng Ergin dan Anwar.
11. Untuk teman-teman seperjuangan, Wiloss, Osdin, Ari, Mbetok, Hugo, Andi, Trisno, Tio, Enjel. Terimakasih banyak atas segala cinta dan kasih kalian. Semoga Tuhan selalu Memberkati kita semua.
12. Untuk Keluarga Besar Ikasamy, Aliansi Tanah Dading, dan teman-teman PMKRI. Terimakasih telah menerima saya untuk berproses bersama.
13. Untuk Ase kae Manggarai Yogyakarta, Kae Ren, Indra, Devon, Lino, Ensa, Mas Tio, Darmin, Osdin, Selin, Maas Viky, kevin, Feldi, Geri, Venan, Sandro dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu di sini. Semua kebaikan dan jasa teman-teman semua selalu ada dalam hati penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Governing Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Wisata” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Skripsi ini salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan. Penulis menyusun skripsi ini dengan harapan bisa berguna bagi umum, baik secara akademis maupun secara praktis. Sehingga penulis telah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Kendati demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan keretakan. Dan pembacalah yang menemukan kekurangan dan keretakan dari karya ini. Oleh karena itu, dengan hati dan pikiran yang terbuka penulis mengharapkan kritikan dan masukan bagi karya ini.

Tentu dalam seluruh proses pengerjaan karya selama ini penulis tidak sendirian. Ada begitu banyak pihak yang hadir dan terlibat dalam setiap moment yang penulis lalui. Mereka hadir untuk mendukung dan menemani serta menyumbangkan ide dan kritik yang berliant dalam pengerjaan karya ini. Oleh karena itu, kepada mereka semua saya ucapkan limpah terimakasih yang tak terbatas.

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A sebagai dosen pembimbing yang setia membanta penulis dalam penyelesaian karya ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang sudah memberikan diri lewat transfer pengetahuan selama proses penyelesaian karya ini.
5. Bapak Lurah Suprptoно beserta perangkat desa dan masyarakat Kalurahan Bleberan yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian ini.

Akhirnya semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada para pembaca dan tentu pembacalah yang berhak dalam menafsirkan karya ini dari setiap teks di dalamnya.

Yogyakarta, 8 Oktober 2021

Penulis,



Agustinus Sukarno

INTISARI

Penelitian ini berjudul *Governing Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUM Desa Desa Wisata di Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Persoalan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah *Pertama*, Kedudukan BUM Desa Desa Wisata yang tidak memfasilitasi kepentingan semua warga desa Bleberan. *Kedua*, Kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah desa dan BUM Desa Wisata mengakses lapak penjualan di sekitar objek wisata Air Terjun Srigethuk lebih memprioritaskan warga Padukuhan Manggoran I dan Manggoran II. *Ketiga*, Implikasi lain dari kedudukan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dan BUM Desa Wisata, berujung pada pengelolaan pendapatan yang dikelola oleh pengelola BUM Desa Wisata tidak efektif dan efisien. Karena itu, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kedudukan, Kebijakan dan Pengelolaan BUM Desa Desa Wisata di Kalurahan Bleberan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan datanya melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi, serta teknik analisi data secara kualitatif berpedoman pada pengumpulan data. Obyek penelitiannya adalah *Governing Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUM Desa Desa Wisata di Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Teknik pemilihan subyek penelitian adalah Teknik *purposive* dengan meminta informan sebanyak 12 orang, dipilih dan dianggap tahu persoalan yang diangkat oleh peneliti.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Pertama*, Kedudukan BUM Desa Desa Wisata Bleberan hanya menguntungkan warga Padukuhan Manggoran I dan Manggoran II dimana lokasi wisata itu berada. Hal ini terlihat dari komposisi pengurus dan karyawan yang berkerja di BUM Desa Wisata hanya warga dari Padukuhan Manggoran I dan Manggoran II. *Kedua*, Kebijakan dan program-program pemerintah desa melalui BUM Desa Wisata dalam mengakses lapak penjualan di seputaran kawasan wisata dan *bisnis home stay* justru melahirkan struktur ekonomi yang timpang. Hanya dinikmati oleh pedagang kelas menengah sosial ke atas yang pada saat bersamaan mengeklusif pedagang kelas menengah sosial ke bawah dalam mengakses kesejahteraan dari keberadaan BUM Desa Wisata. *Ketiga*, Pengelolaan pendapatan BUM Desa Wisata hanya menguntungkan para pengelola dan pegawai BUM Desa Wisata yang mana hasil pendapatan BUM Desa Wisata lebih banyak mengeluarkan biaya untuk gaji pegawai dan biaya oprasional ketimbang masuk ke BUM Desa Wisata. Sementara program lain seperti pemberdayaan dan pelatihan kepada pelaku usaha di Serigethuk belum dilaksanakan serta infrastruktur ke objek wisata belum diperbaiki. Serta kuatnya otonomi BUM Desa Wisata yang sulit untuk dikendalikan dan dikontrol oleh pemerintah desa dan BUM Desa.

Kata Kunci: *Governing Pemerintah Desa, BUM Desa Wisata, Kedudukan, Kebijakan, pengelolaan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi ini berusaha untuk mencari tahu tentang Governing Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Wisata di Kalurahan Bleberan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang sering disebut UU Desa mendapatkan ruang bagi desa untuk mengembangkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk menggerakkan roda perekonomian desa maka diperlukan governing pemerintah desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pendirian BUM Desa ini diatur dalam Permendesa No 4 Tahun 2015. Dalam peraturan ini unit usaha ekonomi dikelola dan dikembangkan oleh BUM Desa meliputi; bisnis sosial sederhana, bisnis penyewaan barang, pranata/jasa pelayanan, bisnis keuangan mikro, usaha bersama/induk unit usaha, dengan ketentuan bahwa bisa membuka usaha asalkan usaha tersebut belum dijalankan oleh warganya. BUM Desa bisa memanfaatkan sumber daya potensi wisata yang dimiliki oleh desa untuk; meningkatkan pendapatan, integrasi dan promosi, peningkatan usaha warga desa, peningkatan industri kreatif dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemerintah

desa memiliki kewenangan untuk pembangunan dan pengembangan desa wisata dan melakukan penguatan atas jasa usaha yang dijalankan. Berangkat dari hal di atas Pemerintah Kalurahan Bleberan bersama masyarakat berinisiatif mengelola objek wisata Air Terjun Srigethuk dan Gua Rancang Kencono melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yaitu; Unit Usaha BUM Desa Desa Wisata dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Namun demikian dalam perjalanannya objek wisata yang dikelola oleh BUM Desa Desa Wisata di Kalurahan Bleberan terjadi paradoks. Sebagaimana hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 15 April 2021. Bahwa keberadaan BUM Desa Desa Wisata di suatu sisi oleh sebagian kecil masyarakat mendapat manfaat dan terjamah perekonomiannya dengan keberadaan BUM Desa Desa Wisata. Sementara di sisi yang lain keberadaan BUM Desa Desa Wisata oleh sebagian besar masyarakat tidak mendapat manfaat dan tidak terjamah perekonomiannya dengan keberadaan BUM Desa Wisata itu sendiri. Hal ini dikarenakan , *Pertama*, Kedudukan BUM Desa Desa Wisata yang tidak memfasilitasi seluruh kepentingan warga masyarakat Kalurahan Bleberan kecuali warga Padukuhan Manggoran I dan Manggoran II di mana lokasi wisata Bleberan itu berada. *Kedua*, Kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah desa dan BUM Desa Wisata untuk masyarakat dalam mengakses lapak penjualan di sekitar objek wisata Air Terjun Srigethuk lebih memprioritaskan warga Padukuhan Manggoran I dan Manggoran II. *Ketiga*, Implikasi lain dari kedudukan dan kebijakan yang

dibuat oleh pemerintah desa dan BUM Desa Wisata yang probelmatis ini, berujung pada pengelolaan pendapatan yang dikelola oleh BUM Desa Wisata tidak efektif dan efisien yang hanya menguntungkan para pengelola ketimbang masuk ke BUM Desa. Juga kuatnya otonomi BUM Desa Wisata menyebabkan sulit untuk kontrol dan dikendalikan oleh pemerintah desa dan BUM Desa “Sejahtera”.

Sehingga dengan demikian, berangkat dari masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis mengacu pada kajian *Governing* yang merupakan salah satu landasan disiplin Ilmu Pemerintahan dalam melihat lebih jauh soal tata kelola pemerintahan terkait kebijakan dan pengelolaan BUM Desa Desa Wisata di Kalurahan Bleberan. Dengan menggunakan pendekatan *Governing* maka tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan: “Bagaimana *Governing* Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUM Desa Desa Wisata di Kalurahan Bleberan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagaian latar belakang masalah di atas, terkait *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDesa Desa Wisata, maka dua pertanyaan pokok yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Wisata di Kalurahan Bleberan; dan

2. Bagaimana implementasi kebijakan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Wisata di Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian yang tertuju pada substansi persoalan yang diangkat.

1. *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Wisata di Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, DIY.
2. Penelitian ini berfokus pada Pemerintah desa itu sendiri, yang difokuskan pada Kepala Desa, Kasi Kesjahteraan, BPD, Ketua BUM Desa, Pengelola BUM Desa Wisata, dan Toko Masyarakat. Selain itu, yang juga paling penting dilibatkan serta menjadi fokus dari penelitian ini adalah masyarakat desa Bleberan lebih khusus pelaku usaha di tempat wisata Srigethuk di Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, DIY.

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan “Bagaimana *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Wisata di Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

E. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dalam penelitian ini yakni; manfaat teoritis dan praktis yang saling melengkapi satu sama lain:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban dan menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait persoalan *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Wisata di Kalurahan Bleberan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan oleh segala aktor yang terlibat serta seluruh masyarakat yang memiliki perhatian yang sama dalam melihat persoalan *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Wisata di Kalurahan Bleberan terlebih khusus pemerintah desa dan masyarakat Bleberan sendiri.

F. Literatur Review

Berdasarkan hasil penelitian sejumlah peneliti sebelumnya terkait BUM Desa Wisata, baik penelitian tentang keberhasilan maupun tentang kegagalan BUM Desa wisata telah banyak dilakukan.

Penelitian tentang keberhasilan BUM Desa Wisata yang dilakukan oleh (Abdullah, 2018) tentang Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu

Kabupaten Deli Serdang. Fokus penelitiannya terkait peran BUM Desa wisata. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BUM Desa sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Denai Lama melalui pengelolaan objek wisata, karena banyak dari masyarakat Desa Denai Lama yang sebelumnya memiliki ekonomi rendah namun setelah adanya objek wisata perekonomian masyarakat meningkat melalui program-program yang di berikan Bumdes dengan mendirikan lapak bagi para pedagang untuk berjualan di sekitar objek wisata. Penelitian yang dilakukan oleh (Daru, 2020), tentang Dampak Sosial Ekonomi Wisata Umbul Brintik Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Fokus penelitiannya terkait Objek Wisata. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Objek Wisata Umbul Brintik memberikan dampak positif kepada masyarakat desa. Hal ini terjadi setelah adanya pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh BUM Des Sumber Makmur Malangjiwan. Yang mana terbukanya lapangan kerja melalui kegiatan pariwisata, peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Hasyim, 2019), tentang Peningkatan Kemandirian Desa Panggungharjo Melalui Komunikasi Pembangunan. Fokus penelitannya terkait pola komunikasi pembangunan yang diciptakan oleh kekuatan leadership lokal mampu menjadikan Panggungharjo masuk nominasi desa terbaik di Indonesia dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Hasil penelitiaannya menunjukkan bahwa Dengan komunikasi efektif menghasilkan masyarakat yang sebelumnya pasif menjadi lebih aktif dengan program pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) tersentral

dengan baik melalui pengelolaan BUM Desa secara efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Hilman dan (Robby, 2019), tentang Strategi Bumdes Dalam Penyelenggaraan Manajemen Aset Serta Pengembangan Komoditas Kepariwisata Di Desa Ponggok, Polan Harjo, Klaten. Fokus penelitiannya terkait manajemen aset. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen aset yang dikelola oleh BUM Desa “Tirta Mandiri” dapat dilihat dari Aspek legal formal sebagai sebuah ancaman dapat diselesaikan melalui pembentukan BUM Desa “Tirta Mandiri” dalam melaksanakan pengelolaan aset, sehingga jelas garis organisasinya, Pendirian badan hukum lembaga sebagai sebuah peluang untuk memperkuat kelembagaan, sehingga investasi yang masuk akan jelas hubungan kemitraan yang menjadi dasar pengembangan aset dan sektor pariwisata destinasi Gastronomi bisa dijadikan kekuatan yang dapat dikembangkan sebagai sektor unggulan yang berdampak langsung dan dirasakan oleh masyarakat desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Parantika, 2020) tentang Pengaruh Status Desa Wisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Ponggok. Fokus penelitiannya terkait dampak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa Ponggok terhadap status desa wisata. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat desa menjadi lebih modern, banyak masyarakat yang beralih profesi yang awalnya petani menjadi pekerja jasa wisata yang membuat pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, serta tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Pengelolaan objek wisata ini juga membuat masyarakat dapat

meningkatkan keterampilan serta kreatifitas dalam hal membuka serta mengelola usaha yang telah mereka bangun.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Djaelani, Dkk, 2020) tentang Pemasaran Tempat Wisata Janda Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Bedauh Barito Kuala. Fokus penelitiannya terkait pengelolaan dan pemasaran tempat wisata. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan pemasaran produk wisata memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetahuan pelaku UMKM pengelola BUM Desa dan aparatur pemerintahan desa Jaya dalam mengelola dan memasarkan tempat wisata dan produk jamur yang dihasilkan melalui berbagai teknik bauran pemasaran dimana dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan desa. Penelitian yang dilakukan (Elsi, Dkk. 2020) tentang Inovasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Fokus penelitiannya terkait pengembangan BUM Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengelolaan BUM Desa terus dilakukan dengan melahirkan inovasi dan terobosan baru dalam pelaksanaan kebijakan dan dalam penerapan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa pada umumnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad dan Fatimatuzzahra, 2021), tentang Peran BUM Desa dan LPM Batu Kumbang Dalam Membranding Desa Wisata. Hasil penelitiannya terkait Desa Wisata Batu Kumbang yang terbentuk pada tahun 2019 perkembangannya cukup baik menuju desa wisata mandiri, data menunjukkan minat kunjungan pada tahun 2020 cukup baik, penduduk lokal menjadikan

alternative peningkatan taraf hidup. BUM Desa dan LPM mengelola dengan meningkatkan value potensi setiap wilayah yang ada di Batu Kumbang. Namun hal ini justru terbalik dalam temuannya yang memperlihatkan bahwa desa wisata batu kumbang tidak merubah potensi yang ada, potensi yang ada tidak dikemas kembali untuk menjadi sesuatu hal yang memiliki nilai. Penelitian yang dilakukan oleh (Alkadafi, Dkk. 2021), tentang Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau. Fokus penelitiannya terkait Kelembagaan BUM Desa Lancang Kuning. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning, Amanah Sejahtera dan Paris Mandiri terbentuk karena adanya intervensi kebijakan Pemerintah Provinsi Riau melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD), Badan Usaha Milik Desa mendapat perlindungan politik dan hukum secara kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Faktor pendukung keberhasilannya adalah modal sumber daya alam, sumberdaya finansial, sumber daya manusia dan modal sosial. Selain itu juga didukung oleh faktor kepemimpinan kepala desa yang inovatif progresif, pengelola Badan Usaha Milik Desa inovatif dan kreatif.

Selain penelitian tentang keberhasilan BUM Desa Wisata seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan memaparkan sejumlah penelitian tentang kegagalan BUM Desa Wisata. Penelitian yang dilakukan oleh (Sumiasih, 2018), tentang Peran BUM Desa Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten

Klungkung). Fokus penelitiannya terkait eksistensi BUM Desa pasca diundangkannya Undang-Undang Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Eksistensi BUM Desa Pasca berlakunya Undang-Undang Desa telah mengalami perkembangan, namun masih terdapat desa di Bali, termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUM Desa. Hingga awal tahun 2018, dari 636 desa, baru 455 desa yang memiliki BUM Desa dan hanya 13 BUM Desa yang mengelola potensi wisata. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk mengelola usaha dan juga belum maksimalnya pendampingan dari pihak pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, Dkk, 2018), tentang Implementasi Kebijakan BUM Desa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah di Kecamatan Dendang, Bangka Blitung. Fokus penelitiannya terkait Implementasi Kebijakan BUM Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan Implementasi kebijakan BUM Desa telah diterapkan namun belum secara tepat merepresentasikan karakteristik wilayah sementara pengembangan sementara potensi wisata didukung gabungan dari bumi dan sumberdaya alam, tenaga kerja, prasarana dan manajemen sehingga dapat meningkatkan posisi ketahanan wilayah sehingga pemerintah menetapkan unit wisata BUM Desa sebagai peta jalan pengembangan pariwisata. Penelitian yang dilakukan oleh (Amir, Dkk, 2020), tentang Identifikasi Potensi dan Status Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Fokus penelitiannya Identifikasi Potensi dan Status Pengembangan Desa Wisata. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa aspek atraksi dan aksesibilitas baik untuk mendukung dan pengembangan desa wisata masih minim. Aspek amenities kesiapan masyarakat dan lembaga pengelola masih terbatas. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Kelompok Sadar Wisata belum optimal untuk mendukung keberlanjutan desa wisata. Begitu halnya dengan promosi yang belum berjalan dengan baik, sehingga dukungan dari pemerintah dan asosiasi sangat diperlukan. Status tahapan perkembangan desa wisata di Lombok Tengah berupa rintisan, berkembang dan maju. Destinasi Desa Sade dan Desa Ende berstatus desa maju dengan atraksi adat budaya Suku Sasak. Penelitian yang dilakukan oleh (Rini dan Tarigan, 2020), tentang Pemanfaatan Wisata Mata Air yang Dikelola oleh BUM Desa di Desa Belik. Penelitian ini fokus pada pengelolaan wisata air hutan bambo yang terletak di Dusun Jibru Desa Belik sehingga menjadi nilai jual tersendiri bagi pengembangan ekowisata. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang menghambat pembentukan dan pengelolaan wisata air diantaranya; belum terbentuknya Peraturan Desa yang mengatur pendirian Bumdes, belum terbentuknya roadmap mengenai desa wisata, kapasitas sumber daya manusia belum memadai, serta terbatasnya inovasi yang mendukung sector pariwisata. Penelitian yang dilakukan oleh (Faradin dan Fanida, 2021), tentang Pengelolaan BUM Desa Tirta Abadi Melalui Strategi Pengembangan Agrowisata Kebun Blimbing Desa Ngringinrejo, Bonjonegro. Fokus penelitiannya terkait pengembangan dan pengelolaan Agrowisata Kebun Blimbing. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya

manusia dalam pengelolaan Agrowisata Blimbing, Kurangnya penguatan Organisasi dan gagal transformasi kelembagaan BUM Desa. Akibatnya pengelolaan BUM Desa Agrowisata Blimbing belum berjalan secara optimal dan maksimal.

Lebih lanjut dalam konteks Kalurahan Bleberan, Penelitian yang dilakukan oleh (Sumarjono, 2018) tentang Efektivitas Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera” Dalam Pengembangan Desa Wisata Bleberan Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Fokus penelitiannya terkait faktor penghambat kinerja BUM Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengembangan BUM Desa “Sejahtera” belum efektif disebabkan inkonsistensi dan komunikasi dari berbagai pemangku kepentingan dan gagal membangun konsesuns. Sementara Penelitian yang sama dilakukan oleh oleh (Sidik, 2015), tentang Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa Fokus penelitiannya terkait Objek Wisata yang dikelola oleh BUM Desa Desa Wisata. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembangunan desa wisata yang dikelola oleh BUM Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa justru dikuasai oleh elit desa yang pada saat bersamaan justru mengekslusi masyarakat miskin yang merupakan kelompok yang menjadi sasaran utama dari pembangunan ekomoi desa.

Berdasarkan hasil kajian literatue review di atas yang fokus penelitiannya BUM Desa Wisata baik tentang keberhasilan maupun kegagalan. Justru kajian ini berbeda dari kajian sebelumnya, kajian ini berangkat dari persoalan BUM Desa Desa Wisata Bleberan terkait; *Pertama*,

Kedudukan BUM Desa Desa Wisata yang tidak memfasilitasi kepentingan semua warga desa Bleberan kecuali warga Padukuhan Manggoran I dan Manggoran II di mana lokasi wisata Bleberan itu berada. *Kedua*, Kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah desa dan BUM Desa Wisata untuk masyarakat dalam mengakses lapak penjualan di sekitar objek wisata lebih memprioritaskan warga Padukuhan Manggoran I dan Manggoran II. *Ketiga*, Implikasi lain dari kedudukan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dan BUM Desa Wisata yang probelmatis ini, berujung pada pengelolaan pendapatan BUM Desa Wisata tidak efektif dan efisien yang hanya menguntungkan para pengelola ketimbang masuk ke BUM Desa. Juga kuatnya otonomi BUM Desa Wisata menyebabkan sulit untuk kontrol dan dikendalikan oleh pemerintah desa dan BUM Desa “Sejahtera”

G. Kerangka Teori

1. *Governing* Pemerintah Desa

Governing pemerintah desa adalah tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa yang sering disebut

Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelolah wilayah tingkat desa, (Purnawati, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) dan (3), yaitu:

- Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
- Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan desa mencakup, kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. Kewenangan desa yang diatur berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negri tentang pedomaan umum kewenangan Desa, Penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa pencalonan dan pemilihan serta penetapan prangkat desa, pembentukan dan penetapan lembanga kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Pencalonan pemilihan dan penetapan anggota bandan perwakilan desa, penyusunan dan penetapan anggaran dan pendapatan belanja desa, pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, penetapan peraturan desa, penetapan kerjasama antar desa, penetapan pinjaman desa, penetapan dan

pembentukan badan usaha milik desa, pengeluaran izin skala desa, penetapan tanah khas desa, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengelolaan tugas pembantuan, pengelolaan dana atas bagi hasil, perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota. Berdasarkan uraian di atas semakin jelas bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul desa, serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan semuanya kepada desa.

Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselesihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD serta memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Wali Kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja

pemerintahan desa, mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik, membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Berdasarkan urain di atas maka governing pemerintah desa adalah tata kelolah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya secara mandiri demi kemandirian desa dan kepentingan masyarakat desa.

2. Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Wisata

Pembangunan kawasan pedesaan memerlukan strategi dan pelibatan masyarakat desa setempat. Salah satu wujud dalam hal pembangunan dikawasan pedesaan adalah dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut (BUM Desa), (Nursetiawan, 2018). Kedudukan BUM Desa sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (4) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUM Desa diatur dalam Permendes No 4 tahun 2015, dalam peraturan ini unit usaha ekonomi

dikelola dan dikembangkan oleh BUM Desa meliputi; Bisnis sosial sederhana, bisnis penyewaan barang, pranata jasa/pelayanan, bisnis keuangan mikro, usaha bersama/induk unit usaha dengan ketentuan bahwa bisa usaha asalkan usaha tersebut belum dijalankan oleh warganya. BUM Desa biasa memanfaatkan sumber daya potensi wisata yang dimiliki oleh desa untuk; meningkatkan pendapatan, integrasi dan promosi, peningkatan usaha warga desa, peningkatan industri kreatif dan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Ciri utama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah: 1). Badan Usaha merupakan milik desa dan pengelolaan bersama-sama dengan masyarakat; 2). Modal usaha berasal dari dana desa dan juga berasal dari dana masyarakat; 3). Operasional dilakukan berdasarkan pada falsafa bisnis yang berbasis pada budaya lokal; 4). Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi landasan untuk menjalankan usaha; 5). Laba yang diperoleh BUM Desa dipergunakan untuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan pada peraturan yang telah dibuat; 6). Fasilitas ditunjukan oleh pemerintah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Desa; 7). Pelaksanaan operasional BUM Desa diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD, Anggota dan Masyarakat.

Sementara tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan

ekonomi masyarakat, serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa. Tujuan lain Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat;
4. Mengembangkan rencana kerja;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemertataan ekonomi Desa;
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Hal ini mempertegas bahwa bahwa BUM Desa adalah untuk menata dan mengelola potensi ekonomi desa melalui BUM Desa yang dipilih sebagai suatu alternatif guna mengembangkan roda perekonomian di desa.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUM Desa adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan mengali potensi yang ada di desa untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan desa.

Sementara desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari adat istiadat, sosial budaya, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti, atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung (Zakarya & Suprihardjo, 2014). Lebih lanjut Hermawan, (2016) mendefinisikan desa wisata sebagai kawasan berupa lingkungan pedesaan yang mempunyai daya tarik wisata berbasis kearifan lokal seperti, adat istiadat, budaya serta kekayaan alam yang memiliki

keunikan dan keaslian berupa ciri khas sesuai suasana pedesaan. Lebih lanjut (Dewi, n.d dalam Gautama dkk, 2020) desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat lokal dan berkelanjutan. Melalui pembangunan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya.

Dengan demikian, menurut (Soekarya, 2011:90 dalam Masihta, 2019) menyatakan bahwa: “pengembangan desa wisata, lingkungan alam dan budaya setempat akan terjaga kelestarian dan kualitasnya, karena masyarakat akan berusaha menjaga dan memelihara lingkungannya untuk tetap lestari bahkan meningkat kualitasnya”. Menurut Muljadi (2009:27) menyatakan bahwa: desa wisata sebagai suatu produk wisata yang melibatkan anggota masyarakat desa dengan segala perangkat yang dimilikinya. Desa wisata tidak hanya berpengaruh pada ekonominya, tetapi juga sekaligus dapat melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat terutama berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan, dan lain-lain. Selanjutnya menurut Fandeli (2012:127) secara lebih komprehensif menjabarkan desa wisata sebagai berikut: desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktivitas keseharian,

arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya.

Berdasarkan pengertian dalam uraian di atas maka Desa Wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan segala potensi sumber daya yang terkandung didalamnya dan dapat menjual berbagai atraksi-atraksi serta keindahan wisata yang menarik sebagai daya tarik wisatawan tanpa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah bagian dari suatu kegiatan dan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksanaan kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan (Anggara, 2014: 232 dalam Nardin, 2019). Sementara menurut Mazmanian dan Zabatier yang dikutip oleh Wahab, (2012:65) dalam Ayuni dan Hidayat, (2019) mengartikan bahwa implementasi kebijakan adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi dan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk mengstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Sementara kebijakan itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Irwandi, Dkk, (2019) menyatakan bahwa kebijakan dapatlah diberi definisi sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang mematuhi. Sedangkan menurut Anderson dalam Irwandi, Dkk, (2019) memberikan pengertian tentang kebijakan sebagai langkah yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah: (a). Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; (b). Kebijakan berisi tindakan-tindakan pemerintah; (c). Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh individu, kelompok, badan atau institusi, jadi bukan merupakan apa yang maksud mau dilakukan; (d). Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan mengenai segala sesuatu masalah tertentu, yang bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu; (e). Kebijakan setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat.

Ada 6 macam kebijakan menurut Grindle dalam Budiono, (2015) *Pertama*, Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Proses implementasi kebijakan akan terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan baik kepentingan individu maupun kelompok. Sehingga didalam seluruh isi kebijakan harus mencakupi seluruh kepentingan agar tidak ada pihak

yang dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. *Kedua*, manfaat kebijakan. Kebijakan yang diimplementasikan harus memiliki manfaat yang berdampak kepada kelompok sasaran. Manfaat kebijakan tersebut yang menjadi pendorong pelaksanaan dan menjadi titik tujuan sebuah kebijakan dilaksanakan. *Ketiga*, Derajat perubahan yang ingin dicapai. Kebijakan yang diimplementasikan berguna untuk adanya sebuah perubahan, sehingga dalam sebuah kebijakan harus memiliki target seberapa besar perubahan yang dikehendaki dengan adanya kebijakan tersebut. Isi kebijakan harus jelas didalam menjelaskan tujuan sebuah kebijakan tersebut. *Keempat*, letak pengambilan keputusan. Dalam implementasi kebijakan, letak pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan harus jelas. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih didalam pengambilan keputusan. *Kelima*, pelaksana program. Dalam implementasi kebijakan harus didukung oleh adanya pelaksanaan program yang memiliki kemampuan/kapasitas untuk menjalankan dan melaksanakan sebuah kebijakan. Pelaksana kebijakan merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan, karena pelaksanaan harus mampu menjalankan kebijakan agar tujuan kebijakan tersebut tercapai. Konten kebijakan yang keenam adalah sumber daya yang digunakan. Sumber daya tersebut akan mendukung pelaksana didalam kebijakan menjalankan kebijakan tersebut agar tujuan kebijakan yang telah ditentukan tercapai. Pelaksana kebijakan yang baik, sehingga di

dalam isi kebijakan harus mencakup sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Dalam implementasi kebijakan beberapa ahli mengkonsepsikan implementasi kebijakan yang ideal yang di dalamnya dijelaskan beberapa variabel yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Sebagaimana Edward III yang dikutip oleh Agustino, (2008) dalam Liow, Dkk, (2018), mengemukakan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan, yaitu;

1. Komunikasi

Dalam komunikasi terdapat tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu;

- a. Transmisi
- b. Kejelasan
- c. Konsistensi

2. Sumber Daya

Elemen yang terdapat dalam sumber daya yaitu;

- a. Staf
- b. Informasi
- c. Wewenang
- d. Fasilitas

3. Disposisi

Hal-hal yang paling penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi yaitu;

- a. Pengangkatan Birokrat
 - b. Insentif
4. Struktur Birokrasi

Dalam struktur birokrasi terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi yaitu;

- a. Melakukan Standard Operating Procedures (SOP)
- b. Melakukan Fragmentasi

Dengan demikian dari dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan pemerintah harus dapat memahami empat variabel penting yang telah disebutkan di atas. Sehingga terori kebijakan ini dapat digunakan untuk pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Wisata di Kalurahan Bleberan.

4. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Wisata

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUM Desa dibangun atas dasar inisiatif pemerintah desa dan masyarakat yang menganut asas mandiri. Seperti yang diatur dalam Permendes No 4 tahun 2015, dalam peraturan ini unit usaha ekonomi dikelola dan dikembangkan oleh BUM Desa meliputi; Bisnis sosial sederhana, bisnis penyewaan barang, pranata jasa/pelayanan, bisnis keuangan mikro, usaha bersama/induk unit usaha dengan ketentuan bahwa bisa usaha asalkan usaha tersebut belum dijalankan oleh warganya. BUMDesa biasa memanfaatkan sumber daya potensi wisata yang dimiliki oleh desa untuk; meningkatkan pendapatan,

integrasi dan promosi, peningkatan usaha warga desa, peningkatan industri kreatif dan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sejalan dengan itu dalam pengelolaan BUM Desa terdapat enam prinsip yang harus dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat agar dalam pengelolaan BUM Desa bisa berjalan dengan baik. Keenam prinsip dalam pengelolaan BUM Desa sebagaimana Purnomo, (2016) dalam Liow, Dkk, (2018);

1. Kooperatif. Komponen-komponen yang terlibat dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif. Dalam pengelolaan BUM Desa masyarakat desa yang ada secara sukarela atau diminta dapat memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat dalam harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. Transparan. Aktivitas yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable. Kegiatan usaha yang ada harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Sementara selanjutnya (Hadiwijoyo (2012: 57), dalam Itha Masitah, (2019)), pengembangan dan pengelolaan desa wisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan untuk menarik wisatawan, yang mana kegiatan dan usaha tersebut dilakukan pula usaha untuk menyediakan fasilitas pendukung pariwisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung. Lebih lanjut Hadiwijoyo, (2005:72) memaparkan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata yaitu:

1. Mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat.
2. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek.
3. Mempromosikan kebanggaan masyarakat.
4. Menjamin sustanbilitas lingkungan.
5. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik.
6. Membantu mengembangkan *cross cultural learning*.
7. Menghormati perbedaan-perbedaan *cultural* dan kehormatan manusia.
8. Mendistribusikan keuntungan yang adil diantara anggota masyarakat.
9. Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi *income* proyek masyarakat.

Pengelolaan desa wisata merupakan bagian dari pemerintah desa dan masyarakat, tetapi pemerintah desa memiliki posisi dan kapasitas yang berbeda dengan masyarakat. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan hak dan kewenangan desa dalam mengurus dan mengatur masyarakatnya berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-

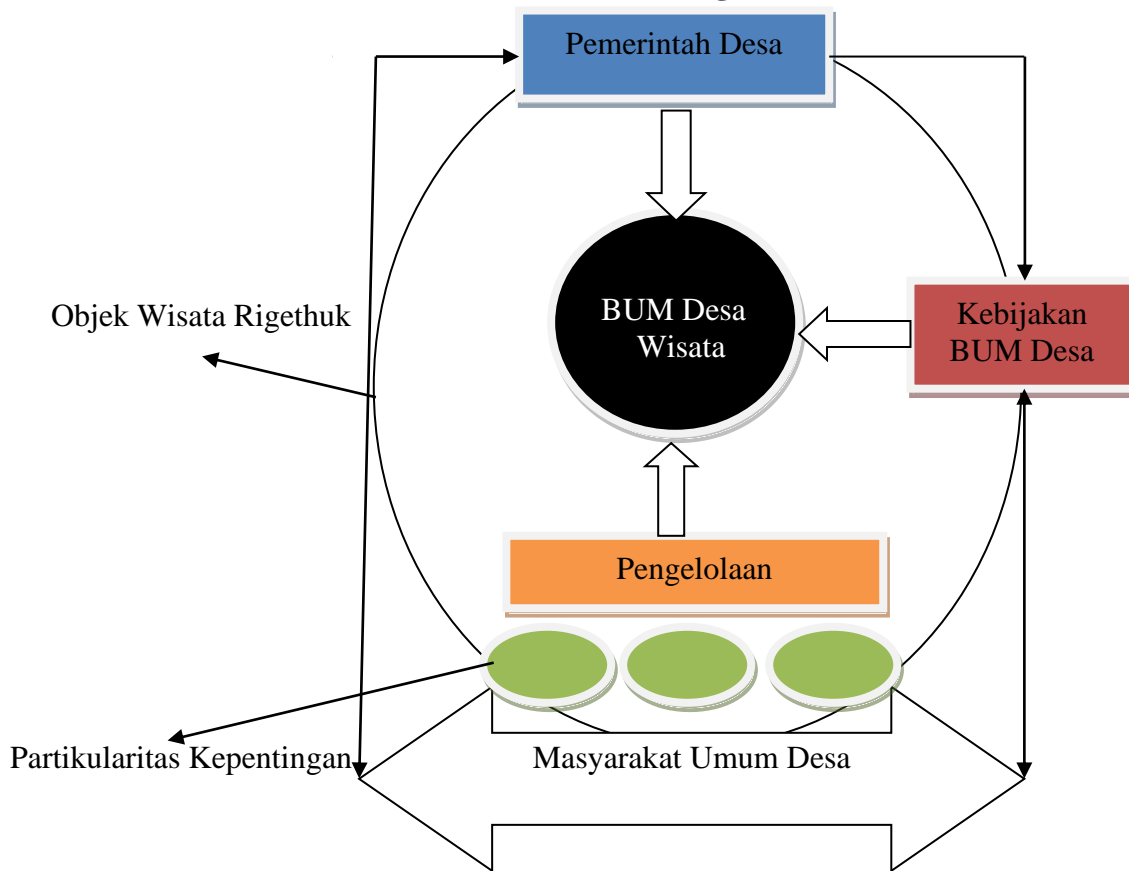
nilai budaya masyarakatnya. Menurut Nugroho dan Sutaryono, (2015: 202) dalam Itah Masitah, (2019) menjelaskan adanya Undang-Undang Desa tersebut desa dipandang sebagai sebuah komunitas dan entitas yang mampu mendefinisikan dan memandirikan diri dengan memanfaatkan serta mengelola aset atau potensi sumber daya yang dimiliki sebagai sumber penghidupan masyarakat desa.

Hal ini juga dipertegas dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa; Desa memiliki hak dan kewenangan dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa”. Sehingga dengan demikian desa memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan desa, termasuk mengelola aset lokal yang potensi untuk dijadikan tempat wisata desa. Selain itu Undang-Undang Desa tersebut juga membuka peluang bagi seluruh masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata.

5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur berpikir peneliti terkait governing pengelolaan BUM Desa Desa Wisata di Kelurahan Bleberan. Berdasarkan kerangka konseptual maka, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat lebih lengkap pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Krangka Pikir



Dalam sekema krangka pikir di atas, BUM Desa Wisata merupakan sebuah wadah yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan menggali dan mengelola sumber daya potensi wisata yang dimiliki oleh desa semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa. Dalam konteks Kalurahan Bleberan kedudukan BUM Desa Desa Wisata diresmikan dan dikuatkan dengan keputusan Kepala Desa Bleberan Nomor 06/KPTS/2009 tentang BUM Desa Bleberan. Dalam surat keputusan tersebut terkandung beberapa pedomaan di dalamnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) BUM Desa Bleberan. Termasuk pedomaan terkait pengeloan dan pengembangan BUM Desa Wisata dengan

tujuan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa. Kendati demikian kedudukan BUM Desa Wisata Bleberan hanya memfasilitasi kepentingan warga Padukuhan Manggoral I dan Manggoran II. Bukan hanya itu berbagai kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah desa dan BUM Desa Wisata untuk masyarakat dengan menyediakan lapak penjualan bagi para pedagang yang ingin berjualan di seputaran kawasan wisata Srigethuk tidak menysar kepada semua warga masyarakat Bleberan yang justru hanya mem-prioritas-kan warga Padukuhan Manggoran I dan Manggoran II. Implikasi lanjutan dari kedudukan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dan BUM Desa Wisata berujung pada pengelolaan pendapatan objek wisata Srigethuk yang dikelola oleh BUM Desa Wisata tidak efektif dan efisien.

Dari pemetaan kerangka konseptual dan pemetaan kerangka beripikir terkait masalah yang diangkat oleh penulis. Terdapat tiga bagian penting yang akan dibahas oleh penulis pada bagian pembahasan diantaranya;

1. Kedudukan BUM Desa Wisata Desa Bleberan
2. Implementasi Kebijakan BUM Desa Wisata Bleberan
3. Pengelolaan dan Pendapatan BUM Desa Wisata Bleberan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berisi tentang gambaran dan penjelasan terkait metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Ibrahim, (2015; 59) metode deskriptif kualitatif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu obyek (realitas atau fenomena) secara apa adanya sesuai situasi dan kondisi di Kalurahan `Bleberan terkait dengan masalah kebijakan dan program BUM Desa Wisata yang tidak mampu melahirkan keadilan dan kesejahteraan unntuk semua warga desa Bleberan selain warga Padukuhan Manggoran I dan Manggoran II. Serta penguasaan atas pengelolaan pendapatan retribusi objek wisata yang hanya menguntungkan pihak pengelola BUMDesa Wisata ketimbang masuk ke BUM Desa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

`Data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer, data sekunder diperoleh dari studi dokumen terkait data di internet, video, dan audio. Sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Teknik penentuan narasumber menggunakan teknik *purposive*

sampling. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan narasumber data dan pertimbangan tertentu. Maka dalam hal ini peneliti memilih narasumber berdasarkan kapasitas dalam memberikan data yang dibutuhkan. Terkait dengan penelitian kualitatif narasumber atau subyek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan langsung antara dua orang atau pewawancara disebut *interviewer* sedangkan orang yang diwawancara disebut *interviewee* yang menjawab pertanyaan itu. Estereberg, dalam Sugiyono (2010: 72), menjelaskan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab yang menghasilkan konstruksi makna tentang suatu topik. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa wawancara untuk menemukan data atau informasi melalui tanya jawab secara langsung dengan informan yang ada di lokasi penelitian sehingga dapat meminimalisir munculnya pandangan epik dalam mendeskripsikan obyek yang akan diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dari narasumber.

Wawancara dilakukan dengan 12 narasumber dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Suprptono, selaku Kepala Desa Bleberan, pada tanggal, 23 Juni 2021
 2. Hartono, selaku KASI Kesejahteraan Desa Bleberan, pada tanggal, 23 Juni 2021
 3. Sumarjumi, selaku ketua BPD Desa Bleberan, pada tanggal, 24 Juni 2021
 4. Erianti, masyarakat pedagang di Srigethuk, pada tanggal, 24 Juni 2021
 5. Zamhar, masyarakat Pedagang di Srigethuk, pada tanggal, 24 Juni 2021
 6. Fausi, masyarakat pedagang Srigethuk, pada tanggal, 24 Juni 2021
 7. M. Alqohar, Ketua Unit II BUM Desa Wisata Bleberan, pada tanggal, 25 Juni 2021
 8. Atik Restiana, Sekertaris Unit BUM Desa Wisata Bleberan, pada tanggal, 25 Juni 2021
 9. M. Supasti, Ketua BUM Desa Sejahtera Bleberan, pada tanggal, 25 Juni 2021
 10. Tri Harjono, Ketua Unit BUM Desa Wisata, pada tanggal, 1 Juli 2021
 11. Mugiarti, masyarakat biasa, pada tanggal, 1 Juli 2021
 12. Ati, pedagang bisnis *home stay*, pada tanggal, 1 Juli 2021
- b. Obsevasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang disistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Obsevasi menjadi salah satu

teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, diorencanakan dan dicatat secara sistematis dan dapat dikontrol kedalaannya (realibilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan piskologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti (Usman dan Akbar, 2006:54). Selain itu, pengmatan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi melalui indra pengelihatan sehingga peneliti dituntut untuk terjun langsung ke lapangan (Djmal, 2005:66). Melalui teknik observasi ini, peneliti berusaha untuk menggali data-data penelitian melalui pengamatan segala bentuk interaksi dan aktivitas yang ada di lokasi penelitian untuk penyusunan latar belakang. Obsevasi ini akan melihat bagaimana kondisi terkini BUM Desa Wisata di Kalurahan Bleberan.

c. Studi Dokumen

Menurut Sugiyono (dalam Nilamasari, 2014), studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatif (Nilmasari, 2014: 179). Metode ini digunakan untuk menelusuri data holistik yang dimaksud adalah berupa jurnal, buku dan laporan yang dianggap relevan dengan topik penelitian dengan melakukan perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan

penelitian serta membantu peneliti mengelola dan menarik kesimpulan dari studi kepustakaan.

Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen yang tertera pada dokumen hasil observasi peneliti di Kalurahan Bleberan terkait BUM Desa Wisata.

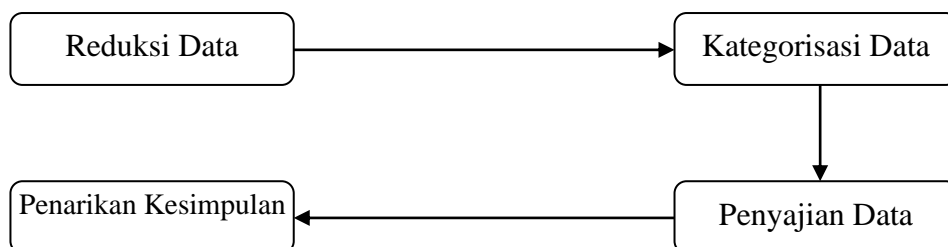
Tabel 1.1
Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data			Teknik Pengumpulan Data
Data Primer	Catatan Lapangan	Narasumber	Wawancara Mendalam
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Supraptono, selaku Kepala Desa Bleberan 2. Hartono, selaku KASI Kesejahteraan Desa Bleberan 3. Sumarjumi, selaku ketua BPD Desa Bleberan 4. Erianti, masyarakat pedagang di Srigethuk 5. Zamhar, masyarakat Pedagang di Srigethuk 6. Fausi, masyarakat pedagang Srigethuk 7. M. Alqohar, Ketua Unit II BUM Desa Wisata Bleberan 8. Atik Restiana, Sekertaris Unit BUM Desa Wisata Bleberan 9. M. Supasti, Ketua BUM Desa Sejahtera Bleberan 10. Tri Harjono, Ketua Unit BUM Desa Wisata 11. Mugiarti, masyarakat biasa 12. Ati, pedagang bisnis <i>home stay</i>, 	
Data Sekunder	Dokumen Tertulis	<ol style="list-style-type: none"> 13. Profil Desa Bleberan 14. RPJMDesa Bleberan 15. Profil BUM Desa Wisata 16. LPJ BUM Desa Wisata 17. Jurnal-jurnal KebijakanBUM Desa Wisata 18. Buku Teoritis terkait penelitian sosial 	Teknik Dokumentasi
	Dokumen Video dan Audio	<ol style="list-style-type: none"> 19. Foto-foto 20. Rekaman Video Wawancara 	

Peneliti dapat menggunakan dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dengan mengutip Guba dan Linchon, Djamal, (2015: 86) mendefinisikan dokument sebagai ‘setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada peminatan seorang peneliti’. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal makalah, memo, surat, nottulen rapat dan sebagainya. Melalui teknik ini, peneliti akan berusaha menggali informasi dari dokumen-dokumen terkait, RPJMDes, RKPDesa, dan lain sebagainya yang tentunya memiliki keterkaitan dengan *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Wissta.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif secara induktif yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris, peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.



Gambar 1.2 Teknik Analisis Data
(Sumber: Miles dan Huberman dalam Ilyas, 2016)

a. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Ilyas, 2016), reduksi data merupakan tahapan penyeleksian data yang diperoleh. Data dibuat lebih ringkas untuk mempermudah peneliti melakukan penyeleksian data. Kegiatan dalam tahap ini adalah membuat uraian atau ringkasan, memilah data yang diperlukan dan membuang data yang tidak perlu, serta melakukan penggolongan data berdasarkan pola-pola tertentu.

Berikutnya adalah membuat transkrip data untuk menggambarkan data secara menyeluruh. Namun jika terdapat kekurangan data maka peneliti perlu memperkuat data tersebut melalui diskusi, maka wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Kategoryisasi Data

Kategoryisasi data merupakan proses memilah-milah sesuai sesuai kode data yang telah ditetapkan oleh peneliti. Setelah itu kategori tersebut akan diberi label. Dengan demikian hal ini dapat memudahkan peneliti untuk menyajikan data yang diperoleh.

c. Data Display (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman (dalam Ilyas, 2016), penyajian data merupakan untuk menarik pokok atau hasil informasi data yang tersusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan flowchart yang pada akhirnya digunakan untuk menarik

kesimpulan dan melakukan tindakan. Penyajian data dibentuk dalam naratif, matriks grafik dan *network* (jejaring kerja) untuk menghindari penyimpanan dalam penyajian. Dengan penyajian data ini maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (dalam Ilyas, 2016), kesimpulan merupakan jawaban atas apa yang dirumuskan sejak awal dalam dalam penelitian, tetapi tidak menutup kemungkinan jika tidak menutup kemungkinan jika tidak menjawab atas apa yang menjadi rumusan masalah awal, karena pada dasarnya rumusan masalah bersifat sementara dan berkembang seiring berjalannya penelitian langsung dilapangan. Kesimpulan yang ditarik didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dengan cara membandingkan pernyataan dengan kenyataan dilapangan, untuk memperoleh pemahaman yang tepat untuk menghasilakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Biasanya disajikan dalam bentuk ikhtiar, bagan, hubungan antara kategori, tabel, grafik, charta, dan sebagainya. Data yang disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteriai tertentu seperti urutan, konsep, kategori, pola dan lain-lain, sehingga mudah dipahami pembaca.

e. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Selain memberikan terhadap rumusan masalah, kesimpulan juga harus menghasilkan temuan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi tentang suatu obyek/fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat pula berupa hipotesis baru.

BAB II

PROFIL DESA BELEBERAN

A. Deskripsi Desa Beleberan

1. Sejarah Desa Beleberan

Pada bab ini merujuk pada uraian dan gambaran umum tentang kondisi Desa Beleberan sebagaimana yang terkandung dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Beleberan tahun 2016-2021. Sejarah tentang desa Beleberan dimulai pada tahun 1720. Yang mana pada waktu itu ada beberapa pelarian atau pengunsian laskar Mataram yang ada di Madiun (Jawa Timur) yang pada tahun itu merupakan pergolakan pengusiran penjajah Belanda oleh kerajaan-kerajaan di Jawa termasuk di dalamnya adalah Mataram, yang pada waktu itu Madiun adalah merupakan wilayah Mataram di wilayah timur. Laskar-laskar tersebut berjalan berpencar menyusuri pantai selatan menuju kearah barat, dan diantara laskar tersebut diantaranya adalah Pemuda Kromo Wongso, Seorang Pati dan Putut Linggo Bawo.

Pemuda Kromowongso bersama kawan seperjuangannya tersebut dalam perjalanan tidak pernah lepas dari laku semedi untuk mendapatkan gaib ataupun wisik untuk bagaimana kedepan melepaskan cengkeraman penjajah yang dianggap telah memporak-porandakan kehidupan bangsa. Dalam perjalanan tersebut ketiga laskar berhenti di suatu tempat untuk beristirahat, tempat tersebut telah ada beberapa penduduk pendatang

juga namun hanya ada beberapa orang. Tempat tersebut masih berupa hutan belantara yang dikelilingi oleh rawa-rawa yang sangat angker. Dalam peristirahatannya pemuda Kromowongso mendapatkan gaib atau wisik bahwa dirinya dapat menetap dan tinggal di tempat tersebut. Malam itu juga ketiganya berembug yang akhirnya diputuskan bahwa Kromowongso akan tetap tinggal di lokasi tersebut dan keduanya akan melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Barat.

Disaat menetap laskar Kromowongso berbaur dengan beberapa para pendatang. Pemuda Kromowongso adalah merupakan pemuda yang gentur tapane ulet, tangguh dalam kanurangan bersahaja dan cepat berinteraksi dengan warga yang ada. Kemudian bersama warga pendatang cancut tali wondo bersama-sama membangun sebuah perkampungan sebagai tempat tinggal permanen atau mendirikan *pranggrok atau gubug*. Dari tingkah laku serta tandang grayang Kromowongso pada waktu itu sangat di kagumi oleh warga, karena memang Kromowongso mempunyai *sipat kandel* atau pusaka yang sangat ampuh di antaranya : *kyi Cacing Kanil, kyi Blabar, Kreis Kyai setrobanyu, Keris kyai Pakuwubono II, Tumbak Banteng*. Maka Pada saat itulah Kromowongso berdasarkan gaib/wisik yang di terima dari sang khalik bahwa untuk dapat membangun wilayah inimenjadi *ayem-ayem toto titi tentrem kalis ing robedo kalis ing sambi kolo* dan ia juga menamakan tempat tersebut dengan nama sesuai dengan salah satu sifat kandel atau pusaka Kyai Kromowongso yang mempunyai kemampuan *magilo-gilo* sangat ampuh yaitu Kyai Blabar. Dari

sini asal usul nama Belebaran yang sekarang digunakan sebagai nama yang resmi.

Pemuda Kromowongso akhirnya menikah dengan putri seasal (juga gadis pelarian dari Madiun) yang bermukim disebelah timur yang saat ini disebut Desa Grogol, Paliyan. Dari kehidupannya kemudian berkembang anak cucu Kromowongso berjumlah enam orang, dan berkembang juga warga disekitar. Pada saat-saat itulah peluang untuk saling berkomunikasi antara pejuang bertambah luas hal ini terlihat dengan terjalinnya ikatan kekeluargaan dengan Demang Bogor (Playen). Ikatan keluarga tersebut berupa besanan antara putra Kyai Kromowongso (Kromosemito) dengan putra Demang Bogor (Wongsopawiro). Wongsopawiro adalah merupakan laskar pangeran Diponegoro yang tangguh dan *sakti modroguno* akhirnya banyak demang yang tersaingi kesaktiaannya sehingga mencari cara untuk menyingkirkan Kyi Wongsopawiro melalui fitnah yang paling ampuh adalah sebagai "*demang mbalelo*" yang akhirnya menjadi target pencarian oleh tentara belanda. Pada suatu saat ketika kyai Wongsopawiro berada di rumahnya dan diketemukan oleh tentara belanda yang akhirnya diberondong hingga tewas.

Kepuasan tentara Belanda tidak berjalan lama karena saat mau di makamkan ternyata jenazah Wongsopawiro menjadi *kedebong pisang* dan Wongsopawiro meloloskan diri, kemudian pengejaran kedua dapat diketemukan ketika bertandang di Blebaran yang pada waktu itu beliau

dibrondong dengan senapan mesin hingga tewas. Untuk melampiaskan kegeraman, tentara Belanda tersebut tidak segera menguburkan mayatnya, namun digantung diteras rumah untuk memastikannya tidak lolosnya. Namun tentara Belanda kembali marah karena pada saat menjelang subuh mayat yang tergantung tersebut berubah menjadi Pusaka yang disebut Pusaka tumbak cacing kanil. Yang saat ini pusaka tersebut diwariskan kepada menantunya (Mbh. Kromopawiro. Seiring berjalanya waktu nama Kromowongso menjadi tersohor, yang kemudian dikenal oleh abdi kerajaan Mataram sehingga diangkat menjadi Bekel atau Lurah yang pertama di wilayah Blebaran. Maka kemudian pusat pemerintahan atau Ibukota Desa yang pertama kali adalah di Blebaran. Sehingga sampai dengan saat ini walaupun pusat pemerintahannya ada di sawahan ibukota Desa tetap Desa Blebaran. Setelah meninggal, Kromowongso dimakamkan di Padukuhan Blebaran dan merupakan Cikal bakal Padukuhan Blebaran.

2. Kondisi Geografis Desa Beleberan

Desa Beleberan merupakan salah satu dari 13 Desa di wilayah Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul yang berada di sector barat, Jarak orbitasi dengan Ibukota Kecamatan Playen adalah 4 km sedangkan untuk jarak dengan Ibukota Kabupaten adalah 10 km serta jarak dengan Ibukota Provinsi adalah 40 km. Luas wilayah Desa Beleberan secara keseluruhan 16.262.170 Ha yang terdiri dari tanah sawah tadah hujan: 493 Ha, sawahan irigasi: 15 Ha, tegalan:489.217 ha. Dengan batas wilayah al:

Tabel 2.1: Batas Wilayah Desa Beleberan

No	Wilayah	Berbatasan Dengan
1	Utara	Desa Getas dan Desa Dengok
2	Barat	Desa Banyusoco dan Wilayah Kehutanan
3	Selatan	Wilaya Kehutanan RPH Karang mojo
4	Timur	Desa Dengok dan Desa Plembutan

(Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa Beleberan Tahun 2016-2021)

Sedangkan letak gografis desa Beleberan berada di ketinggian 188;20 m diatas permukaan laut dengan suhu 23-33 derajat C dengan kelembaban nisbi berkisar 80%-85%, serta curah hujan pada tahun 2016 sebesar 1.400 mm/thn. Dengan jumlah hari hujan 89 hari. Bulan basah 4-5 bulan, sedangkan bulan kering antara 7-8 bulan. Desa beleberan 90% adalah merupkan darerah datar dan 10% adalah berbukit yang terdapat di tiga padakuan (Padukuhan Menggorang I, Menggorang II, dan Ngarancang). Jenis tanah pertaniaannya beragam yang didominasi oleh tanah margalit oleh karena itu setiap musim kemerau lapisan tanah mengalami retak-retak atau lebih dikenal “telo” lebar dan panjag telo tersebut besarnya berkorelasi negatif dengan tingkat kelembaban dan kandungan bahan organic tanah ini terdapat di wilayah tengah ke timur (Padukuhan Peron, Tanjung I, Tanjung II, Beleberan Sawahan dan Srikoyo). Sedangkan di sector tengah utara tanah berkapur dan untuk wilayah barat Menggorang I, Menggorang II, Ngrancang dengan tanah merah.

3. Kondisi Demografis Desa Bleberan

Pada bagian ini mendeskripsikan kondisi demografis atau kependudukan Desa Bleberan, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya; menuju pada dokumen RPJMDesa Bleberan 2016-2021.

a. Kependudukan

Tabel 2.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Laki-laki	2688	0	2688
2	Perempuan	0	2653	2653
	Total	2688	2653	5341

(Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bleberan Tahun 2016-2021)

Dari data di atas, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa Bleberan berdasarkan jenis kelamin memiliki proporsi yang seimbang. Dari jumlah penduduk yang secara umum, baik laki-laki maupun perempuan tidaklah berbeda jauh. Jumlah laki-laki 2688 jiwa, sedangkan jumlah perempuan 2653 jiwa. Lebih lanjut jika mengacu pada data di atas tentunya sangat menarik bagi mereka yang ingin mengkaji lebih jauh soal distribusi kekuasaan politik dari segi gender.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

No	Jenis Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum Kawin	1204	902	2106
2	Kawin	1411	1426	2837
3	Cerai Hidup	31	57	88
4	Cerai mati	42	268	310
	Total	2688	2653	5341

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bleberan Tahun 2016-2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa Bleberan berdasarkan status perkawinan 1sebagian besarnya sudah berkeluarga berjumlah 2837 jiwa, yang belum berkeluarga berjumlah 2106 jiwa dan cerai hidup berjumlah 57 jiwa serta cerai mati berjumlah 310 jiwa. Data di atas juga tentunya menarik untuk menjadi panduan dalam membuat sebuah kebijakan di Desa agar menysasar pada mereka yang sangat rentan secara ekonomi. Terlebih khusus bagi mereka cerai mati yang berjuang untuk menghidupi diri mereka dan keluarganya secara mandiri.

Tabel 2.4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	477	431	908
2	Mengurus Rumah Tangga	0	263	263
3	Pelajar/Mahasiswa	470	381	851
4	Pensiunan	66	39	105
5	Pegawai Negri Sipil (PNS)	50	31	81
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	4	0	4
7	Kepolisian RI (Polri)	1	0	1
8	Perdagangan	4	10	14
9	Petani/Perkebunan	928	1164	2092
10	Peternak	1	2	3
11	Nelayan/Perikanan	0	0	0
12	Industri	0	1	1

13	Konstruksi	0	0	0
14	Transportasi	0	0	0
15	Karyawan Swasta	173	95	268
16	Karyawan BUMN	0	0	0
17	Karyawan BUMD	1	1	2
18	Karyawan Honorer	11	20	31
19	Buruh Harian Lepas	90	43	133
20	Buruh Tani/Perkebunan	1	4	5
21	Buruh Nelayan/Perikanan	0	0	0
22	Buruh Peternakan	1	0	1
23	Pembantu Rumah Tangga	0	4	4
24	Tukang Batu	6	0	6
25	Tukang Jahit	1	1	2
26	Tukang Gigi	0	0	0
27	Mekanik	0	0	2
28	Pendeta	0	1	1
29	Guru	7	12	19
30	Perawat	0	1	1
31	Sopir	19	0	19
32	Pialang	0	0	0
33	Paranormal	0	0	0
34	Pedagang	2	3	5
35	Prangkat Desa	21	1	23
36	Kepal Desa	1	0	0
37	Biarawati	0	0	0
38	Wiraswasta	351	145	496
	Total	2688	2653	5341

(Sumber: Dinas DUKCAPIL Kab. Gunungkidul Th 2015)

Dari data dapat dilihat dan disimpulkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Bleberan berdasarkan jenis pekerjaan baik laki-laki dan perempuan mayoritas petani/pekebun dengan berjumlah 2092 orang, yang belum bekerja berjumlah 908 orang, pelajar/mahasiswa berjumlah 851 orang, wiraswasta berjumlah 496 orang, kariawan swasta berjumlah 268 orang, mengurus rumah tangga berjumlah 263 orang, buruh harian lepas berjumlah 133 orang, pensiunan 105 orang, PNS 81 orang dan pekerjaan lain-lainnya. Data di atas juga sangat

berguna dan tentu sangat menarik untuk dijadikan panduan dalam melihat formasi kelas sosial warga Desa Bleberan dengan mengsandingkan dengan berbagai jenis sektor pekerjaan warga yang barangkali pendapatannya sangat rendah serta berpotensi dieksploitasi dengan pekerjaan yang lainnya. Maka dari itu penting untuk melihat kembali beberapa kebijakan pembangunan desa agar bisa melihat sejauh mana kebijakan dibuat itu mendistribusikan keadilan bagi semua warga desa.

b. Pendidikan

Tabel 2.5: Fasilitas Pendidikan Yang Ada di Desa Bleberan

No	Jenis Sekolah	Jml Unit	Kondisi Sekolah		
			Baik	Sedang	Rusak
1	TK	10	4	-	-
2	SD	2	2	-	-
3	MI	3	3	-	-
4	PKBM	1	Belum Punya Gedung		
5	PAUD	4	Menginduk Pada STKM Bleberan		

(Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

Dari data di atas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Bleberan masih mini dan kurang serius dalam menangani pemberdayaan masyarakat disektor pendidikan. Hal ini bisa kita lihat dari data di atas bagaimana Desa Bleberan belum mempunyai gedung yang menjadi wadah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Mengingat banyak masyarakat yang tidak/belum sekolah sama sekali baik laki-laki maupun perempuan berjumlah 1185 orang, yang belum tamat SD/Sederajat berjumlah 762 orang, dan yang tamat SD/Sederajat 1berjumlah 1312 orang. Tentunya hal ini bisa

dilihat pada tabel di bawah ini berdasarkan tingkat pendidikan. Akibat dari banyak warga yang tidak mengenyam pendidikan berimplikasi pada pengetahuan mereka tentang politik dan minimnya keikutsertaan atau keterlibatan mereka dalam pembangunan yang ada di desa.

Tabel 2.6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	518	667	1185
2	Belum Tamat SD/Sederajat	375	387	762
3	Tamat SD / Sederajat	645	667	1312
4	SLTP/Sederajat	547	527	1074
5	SLTA / Sederajat	504	306	810
6	Diploma I / II	33	33	66
7	Akademi/ Diploma 1/III/ S. Muda	12	13	25
8	Diploma IV/ Strata I	51	50	101
9	Strata II	3	2	5
10	Strata III	0	1	1
	Total	2688	2653	5341

(Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bleberan Tahun 2016-2021)

e. Keagamaan

Kegiatan religi masyarakat Desa cukup baik dengan berbagai agama yang ada masyarakat tetap kondusif belum pernah adanya gesekan antar agama sehingga tingkat kriminalitas dan juga kenakalan remaja dapat di minimalisir.

Tabel 2.7: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	2648	2599	5247
2	Kristen	35	40	75
3	Katholik	5	14	19
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	0	0	0
6	Khonghucu	0	0	0
7	Lainnya	0	0	0
	Belum Mengisi	0	0	0

(Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bleberan Tahun 2016-2021)

Dari data di atas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa mayoritas penduduk berdasarkan agama di desa Bleberan adalah yang menganut agama Islam lebih banyak berjumlah 5247 orang, Kristen 75 orang, dan Katholik 19 orang. Selain itu juga, organisasi keagamaan yang paling besar dan paling banyak pengikutnya di Desa Bleberan adalah Nahdlatul Ulama (NU).

d. Kesehatan

Sampai dengan tahun 2015 kesehatan masyarakat cenderung meningkat kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Hal ini didukung dengan jumlah kader sehat desa berjumlah 212 kader. Dan untuk kesehatan masyarakat dari sisi perumahan dan lingkungan AL:

Tabel 2.8: Kondisi Perumahan dan Lingkungan

No	Padukuhan	Rumah							Jamban			
		Fisik				Lantai			Cls	Prm	Trd	Tp
		P	Sp	Pp	Gdk	Krm	Tgl	Tnh				
1	Peron	30	4	2	48	2	44	38	25	36	20	28
2	Tanjung I	35	17	5	34	3	71	16	27	13	25	0
3	Tanjung II	16	12	19	25	2	52	18	13	11	48	0
4	Bleberan	31	26	18	63	7	40	42	31	24	80	0
5	Sawah I	44	32	3	51	11	81	36	33	9	78	8
6	Sawah II	36	6	2	32	3	49	40	15	30	38	10
7	Putat	27	4	21	43	7	78	12	23	1	65	6
8	Srikoyo	42	16	9	52	10	62	49	16	67	21	16
9	Menggoran I	53	15	40	58	8	117	41	34	19	82	31
10	Menggoran II	59	58	8	64	14	103	43	34	20	92	38
11	Negerancang	64	1	36	28	7	103	19	57	0	47	25
	Jumlah	437	191	163	489	74	850	354	308	230	596	162

(Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bleberan Tahun 2016-2021)

Keterangan: 1

Kolom Fisik : P : Permane, Sp: Semi Permanaent, Pp: Papan, Gdg : Gedek

Kolom Lantai : Krm: Kramik, Tgl: Tegel, Tnh : Tanah

Kolom Jamban : Cls: Closed, Prm: Permanent, Trd: Tradisional, Tp: Tidak Punya

Dari data di atas dapat dilihat dan disimpulkan berdasarkan kondisi lingkungan dan perumahan masyarakat bahwa jumlah warga yang memiliki rumah permanen dan didukung oleh pola lingkungan sehat jumlahnya tidak sama atau tidak berimbang dengan jumlah warga yang memiliki rumah yang tidak permanen dan tidak didukung oleh lingkungan yang sehat. Kebanyakan fisik rumah warga menggunakan degek, berlantai tegel, tegel tanah 1 dan atau tanah saja. Keadaan ini bisa dibaca atau dilihat akan

naiknya ketimpangan yang terjadi di Kalurahan Bleberan. Hal ini perlu dipriksa lebih jauh soal kebijakan dan program pembangunan di desa yang salah untuk segera dibenahi agar program-program atau pun kebijakan kedepannya tetap sasaran bagi warga masyarakat yang lemah secara ekonomi yang menjadi prioritas utama.

Desa Bleberan juga terdapat PUSKESMAS II Playen dengan Gedung yang di bangun tahun 2007 dan belum memberikan pelayanan rawat inap karena kondisi yang belum memungkinkan. Dengan jumlah tenaga medis dan Karyawan:

Dokter umum	: 1 Orang
Dokter gigi	: 1 Orang
Analisis kesehatan	: 1 Orang
Ahli gizi	: 1 Orang
Perawat	: 4 Orang
Bidan	: 5 Orang
Karyawan	: 18 Orang

Salah satu faktor yang mendukung aspek kesehatan di Desa Bleberan adalah ketersediaan air bersih. Sarana air bersih di Desa Bleberan sebagian besar masyarakat menggunakan PDAM Desa dan juga sebagian kecil masyarakat menggunakan sumur, Pengelolaan PAM Desa di Kelola dengan BUMDesa dengan SK pendirian Perdes No. 06 /Tahun 2009 dengan nama BUMDesa "SEJAHTERA".

4. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa

a. Keadaan Sosial Desa

Warga masyarakat Kalurahan Bleberan masih memelihara nilai-nilai gotong royong, tolong-menolong, semangat kebersamaan, serta rasa kesatuan yang kuat dan jika ada yang tidak melakukan atau menjaga hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat sekitar yang berupa celaan, gunjingan, dan lain-lain. Ini merupakan potensi yang luar biasa sebagai modal pembangunan di Kalurahan Bleberan. Pembangunan masyarakat Desa dengan arus modernisasi juga membawa dampak perubahan sosial budaya di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat kita sering mendengar adanya lembaga-lembaga tradisional dan lembaga-lembaga modern. Sejalan dengan itu terdapat pula “pola ajar tradisional” dan pola “pola ajar moderen”. Pola ajar tradisional mengajarkan cara-cara atau hal-hal yang kurang lebih sama dengan yang telah di praktekkan oleh generasi sebelumnya (ayah, kaka, nenek, orang tua dan sebagainya). Dan pola ajar inilah yang diterapkan agar pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya lokal dapat dicegah.

Karakteristik sosial masyarakat Kalurahan Bleberan adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Kalurahan Bleberan cenderung memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku.

2. Kehidupan di desa Blebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bersama terlibat dalam kegiatan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
3. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada. Misalnya kertekaitan anggota masyarakat daengan tanah atau desa kelahirannya. Hubungan antarwarga desa terjalin lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan hubungan mereka dengan masyarakat lainya diluar batas wilayah desanya.
4. Mata pencaharian utama penduduk umumnya adalah bertani.
5. Kontrol sosial ditentukan oleh nila moral dan hukum internal (hukum adat).

b. Perekonomian Desa

Perekonomian masyarakat Kalurahan Bleberan dilihat perkembangan tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, terlihat pada perekonomian masyarakat dengan daya beli cukup meningkat, peningkatan tersebut didominasi pada sektor pertanian yang dapat mendukung 50%, sektor peternakan (sapi dan kambing) 30% dan perikanan 10% dan jasa 10%. Apalagi dengan dilakukannya kerjasama masyarakat dan pihak kehutanan dengan SK pengelolaan Hutan Kemasyarakat (HKN) dan juga kerjasama yang sifatnya non formal pengelolaan Hutan bersama masyarakat hal ini dapat mendogkrak pendapatan masyarakat yang dapat mencapai 100%. Sektor pertanian

yang menjadi unggulan adalah: jagung, kedelai, padi, ketela, sedang untuk sayuran: col, cabe, kacang pajang, ketimun dan terong.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sector pertanian sampai dengan saat ini masih menjadi andalan masyarakat Desa Bleberan yang memang mayoritas petani, namun yang menjadi kendala adalah kepemilikan lahan petani yang rata-rata masyarakat petani hanya memiliki lahan 0, 2 ha / kk sehingga dimasa mendatang aspek menejemen kelembagaan harus mendapatkan perhatian yang serius serta kedepan diperlakukan pembangunan pertanian dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya alam dan manusia dengan didukung tehnologi anjuran terkini dan spesifik serta memperhatikan daya dukung lahan dan juga perdampungan kelompok-kelompok tani agar menjadi lebih mandiri.

Sector industri sampai dengan tahun 2016 masih sangat kecil walaupun minat masyarakat cukup tinggi dengan pengelolaan hasil pertanian namun kelemahan untuk menembus pasar masih sangat lemah, ada beberapa kelompok antara lain industri alat pertanian, kerajinan kulit, mebel, dan home industri lainnya namun sampai saat ini untuk beberapa hasil industri padai besi dan olahan makanan telah mulai menembus pasar luar wilaya desa namun sebagian masih untuk kebutuhan pasar local. Sector pariwisata di Kalurahan Beleberan sudah dikelola dengan cukup baik melalui BUMDesa sehingga sudah mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa, tetapi masih

bisa dikembangkan lebih maksimal sehingga akan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Desa, infrastruktur jalan disekitar obyek wisata masi belum memadai (belum diaspal) sehingga masih perlu penanganan serius dari semua pihak baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

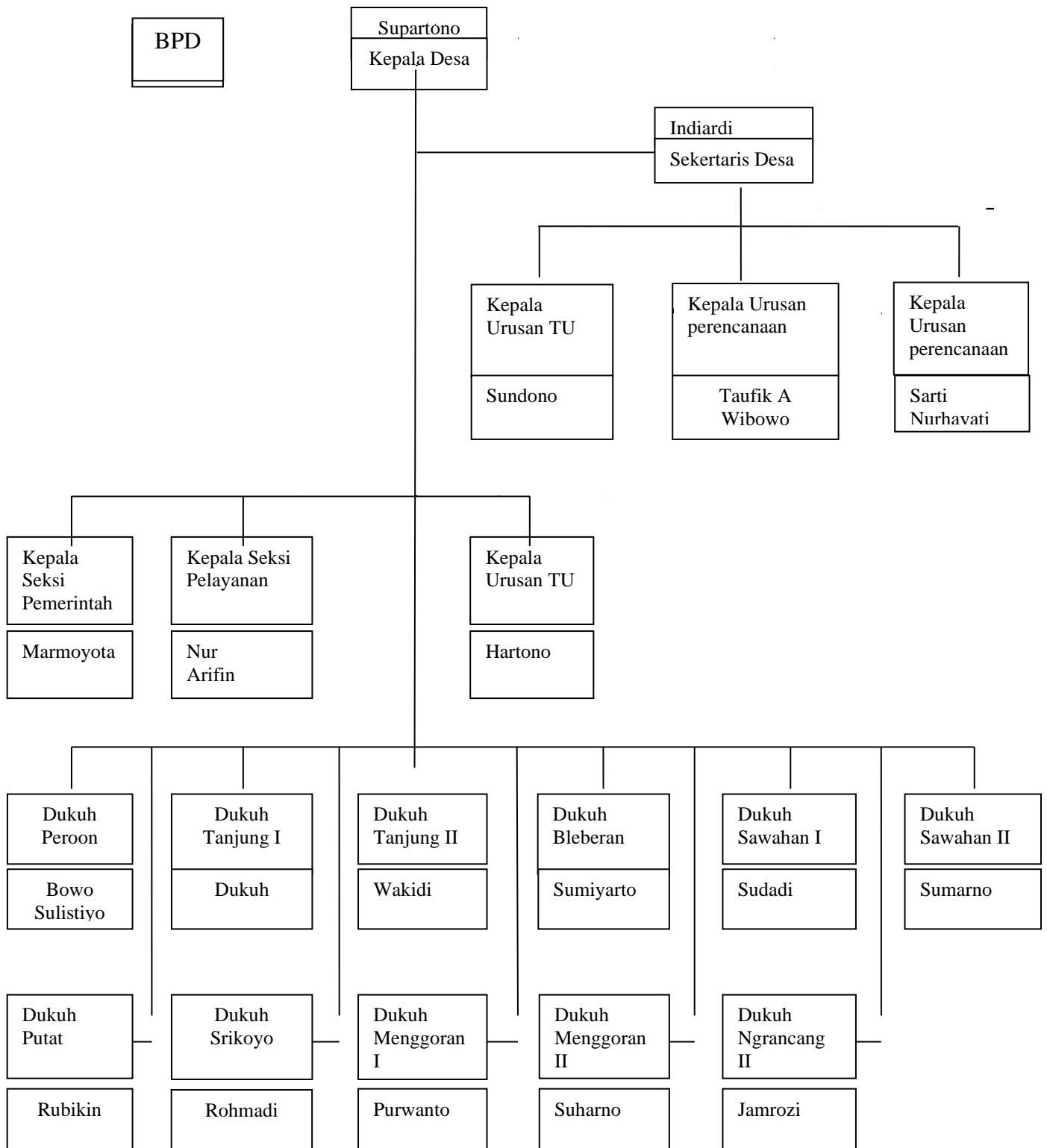
Namun demikian potensi yang cukup banyak diantaranya: Gua racang kencono, Air terjun slempret, Tebing indah, Bumi perkemahan, Hutan kemasyarakatan, masih perlu mendapatkan dukungan yang maksimal baik dari pemerintah Daerah, Provinsi serta Pusat karena pariwisata kedepan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang sanga baik bagi masyarakat. Lokasi wisata tersebut ada dilokasi wilayah ada disector barat wilayah Kalurahan Bleberan tepatnnya di Padukuhan Menggoran, pada saat ini setelah dilaksanakan launcing sudah banyak dikunjungi wisatawan baik local maupun luar negri terutama pada hari Sabtu, Minggu serta hari-hari libur, dan menjadi daya tarik wisata di Kalurahan Bleberan adalah susur sungai oyo dengan prahu 450m dengan menikmati tebing indah setinggah 50m disepanjang sungai oyo yang kemudian berakhir menikmati air terjun Srigethuk. Namun dengan kondisi infrastruktur jalan untuk memasuki lokasi wisata belum teraspal 1 Km serta jalan menuju Padukuhan Menggoran sepanjang 1000m telah mengalami rusak parah sehingga menjadi keluhan para wisatawan.

Kemudian situs purbakala ada di wilayah Padakuhan Bleberan situs tersebut adalah merupakan peninggalan zaman batu dan saat ini telah ditata dan ditempatkan pada tanah yang telah dibebaskan dari dinas purbakala Provinsi DIY. Arah pengembang pariwisata Kalurahan Bleberan ke depan pembangunan saran dan prasarana pendukung potensi alam yang sudah ada agar lebih mempunyai daya tarik wisatawan antara lain: kolam pemancingan dengan gubuk-gubuk bambu sebagai tempat menikmati hasil pancingan, pembenungan sungai oyo sebagai wisata berprahu. Kolam renang, fasilitas olahraga, gedung pertemuan yang tradisional, pembangunan out bond penambah atraksi pariwisata. Serta penyusunan paket-paket wisata, home stay serta pengembangan industrin olahan serta cendera mata.

5. Kondisi Pemerinta Desa

Pemerintaha Kalurahan Bleberan terdiri dari: Kepala Desa, Sekertaris Desa, Urusan Umum, Urusan Keuangan, Urusan Perencanaan, dan Kabag Pemerintahan, kesejahteraan Masyarakat, seksi dan terakhir Dukuh.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Beleberan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.9: Jumlah Padukuhan dan jumlah RT dan RW antara lain:

No	Nama Dusun	RW	RT
1	Bleberan	1	10
2	Menggaron I	1	11
3	Menggaron II	1	11
4	Ngrancang	1	8
5	Peron	1	5
6	Putat	1	7
7	Sawah I	1	9
8	Sawah II	1	5
9	Srikoyo	1	7
10	Tanjung I	1	6
11	Tanjung II	1	6
	Total	11	85

(Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bleberan Tahun 2016-2021)

Dari data di atas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa di Desa Bleberan Padukuhan berjumlah 11, RT berjumlah 85 dan RW berjumlah 11. Data di atas juga bisa dibaca bahwa Dukuh, RT dan RW memiliki peran yang sangat sentral dan berpengaruh sebagai aktor yang paling dekat dengan warganya serta memahami betul kondisi warga dan mengetahui betul apa yang menjadi kebutuhan warganya masing-masing agar keluar dari cengkaman ketidakberdayaan. Dalam konteks kelembagaan juga Kepala Dukuh, Kepala RT dan Kepala RW membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas memberdayakan masyarakat desa.

B. Pembentukan BUMDesa Desa Wisata Bleberan

Desa Wisata Bleberan terletak di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Munculnya desa wisata Bleberan tidak terlepas dari kondisi realitas perekonomian masyarakat yang dikategorikan

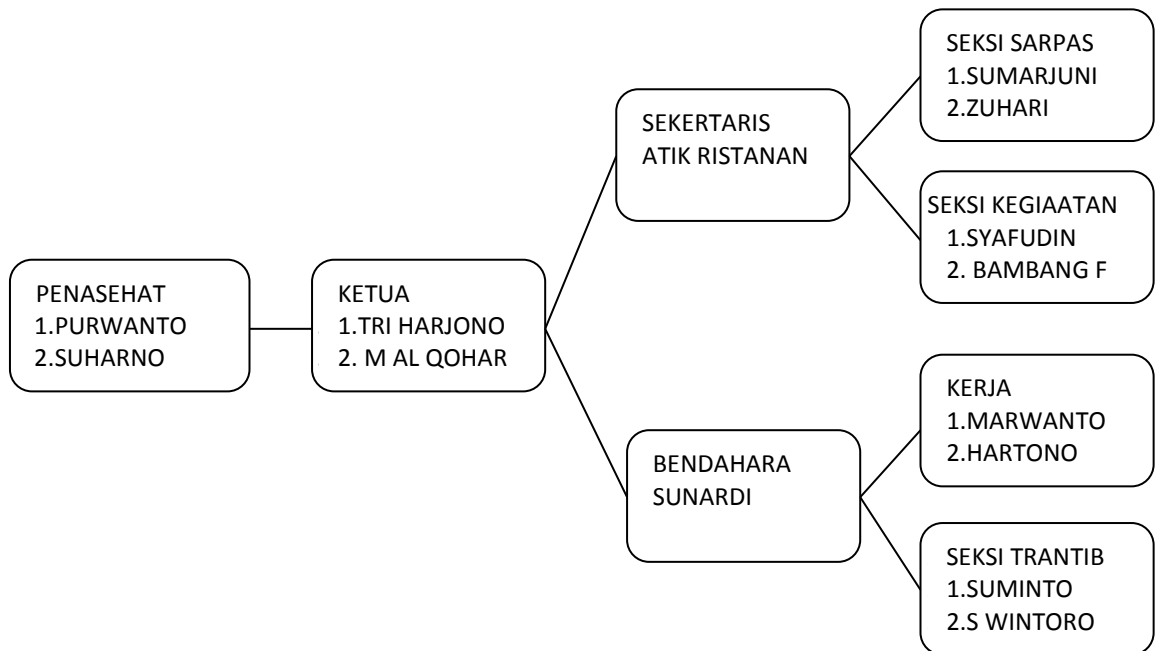
miskin. Oleh sebab itulah, pemerintah desa bersama masyarakat berinisiatif untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan potensi lokal diantaranya; Gua Rancang Kencono, Air Terjun Slempret, Situs Purbakala, dan Air Terjun Srighetuk untuk dijadikan potensi wisata. Dalam prosesnya pembentukan BUM Desa Desa Wisata ini memang tidak mudah, banyak hal yang dilalui demi terwujudnya desa wisata. Sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Tri Harjono yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa dan sekarang menjadi ketua pengelola BUM Desa Desa Wisata dan salah satu unsur Pemerintah Desa. Menjelaskan bahwa proses pembentukan BUM Desa Desa wisata Bleberan dulu tidak mudah. Sebelum BUM Desa Desa wisata berhasil dibentuk warga masyarakat Padukuhan Manggoral I dan Manggoran II membentuk wadah atau paguyuban yang bertugas mengelola Air Terjun Srighetuk dan Gua Rancang Kencono yang di ketuai oleh Bapak Sukandi dan Abdula (alm). Waktu itu tidak ada redistribusi bagi para pengunjung, sementara dana untuk biaya perawatannya bersumber dari swadaya masyarakat dan donatur. Sejak tahun 2007 masih di bawah kepemimpinan kepala desa Tri Harjono melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dan masyarakat untuk merintis desa wisata Bleberan. Persis pada tahap ini bapak Tri Harjono dipertentang oleh ketua Paguyuban yang mengelola Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencono.

“Singkatnya, untuk membentuk BUM Desa desa wisata pada waktu itu tidaklah mudah dikarenakan relitas kehidupan warga yang sangat erat dengan budaya. Bahkan dulu ketika saya memperkenalkan ide tentang desa wisata dengan memanfaatkan potensi wisata Air Terjun Sri Gethuk dan

Gua Rancang Kencono untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ide ini ditentang oleh tetua yang ada di Manggoran I dan Manggoran II dengan alasan jagan sampai budaya dan tradisi yang sudah melekat dikikis oleh para wisatawan yang datang berkunjung apalagi budaya desa yang sangat religius. Tetapi saya tidak berhenti disitu untuk memperjuangkan ide tentang desa wisata ini, karena bagaimanapun realitas masyarakat desa banyak yang miskin maka kita berupaya untuk membentuk desa wisata agar dapat meningkatkan perekonomian warga ketika kita memanfaatkan potensi alam. Saya kemudian mengumpulkan warga di Padukuha Manggoran I dan Monggoran II baik mereka yang menentang pembentukan desa wisata maupun mereka yang menerima untuk berembuk bersama terkait pembentuk desa wisata ini. Hasil dari rembuk dengan warga dari kedua padukuhan tersebut merka menerima untuk pembentukan desa wiata. Tetapi harus mempertimbangkan budaya yang ada dimasyarakat maka visi desa wisata Bleberan yaitu; Produktif, Indah, Nyaman, Tertib dan Religi (Pintar). Kemudian pada tahun 2007 desa Bleberan memperkenalkan dirinya sebagai Desa Wisata. Dan pada tahun 2010 pemerintah desa mengundang pihak dari kabupaten dan warga desa serta beberapa media publikasi untuk meresmikan Desa Wisata Bleberan. Sehingga pada akhirnya Desa Wisata Bleberan dikenal oleh masyarakat umum sampai saat ini”, (Wawancara dengan ketua Unit Usaha BUM Desa Wisata Bapak Tri Harjono Pada tanggal 1 Juli 2020

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan awal BUM Desa Desa Wisata Bleberan tidaklah mudah. Begitu banyak dinamika yang dialami dan terjadi pada proses pembentukan BUMDesa Desa Wisata Bleberan. Namun dinamika tersebutlah yang mengantarkan Desa Wisata Bleberan dikenal oleh khalayak umum. Hingga sampai saat ini banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata Bleberan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Jika sebelumnya objek wisata Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencono tertutup dan terisolasi, maka kini Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencono menjadi ikon objek wisata Desa Wisata Bleberan yang aksesnya terbuka secara umum.

1. Struktur Pengelolaan Harian BUM Desa Wisata Bleberan Tahun 2020



2. Tabel 2.10: Pendapatan BUM Desa Wisata Belebran Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pengunjung	Jumlah Pendapatan Keseluruhan	Jumlah Pendapatan BUMDesa Wisata	Jumlah Gaji Karyawan dan Biaya Oprasional
2016	136.271	2.044.065.000	272.542.000	1.226.439.000
2017	112.260	1.683.900.000	224.520.000	1.010.340.000
2018	81.519	1.222.785.000	163.038.000	733.671.000
2019	64.943	974.145.000	129.868.000	584.406.000
2020	35.497	532.455.000	70.958.000	319.473.000

Tabel di atas merupakan jumlah kunjungan dan pendapatan unit usaha BUM Desa Wisata dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari data di atas juga kita temukan jumlah pengunjung dan pendapatan dalam kurun waktu lima tahun belakngan ini terus mengalami penurunan. Hal ini bisa dilihat dari tabel di atas jumlah pengunjung dan pendapatan yang paling tinggi hanya

terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah pengunjung 136.271 orang dan jumlah pendapatan berkisar 2.044.065.000 serta kontribusi terhadap pendapatan BUM Desa Wisata berkisar 272.542.000 dan biaya gaji pegawai dan oprasional berkisar 1.226.439.000. Sedangkan jumlah pengunjung dan pendapatan yang mengalami penurunan secara drastis terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah pengunjung 35.497-orang dan jumlah pendapatan berkisar 532.455.000 serta kontribusi terhadap pendapatan BUM Desa Wisata berkisar 70.958.000 dan biaya gaji pegawai dan oprasional berkisar 319.473.000.

Penurunan jumlah pendapatan dan jumlah pengunjung pada tahun 2020 disebabkan pada awal tahun tersebut munculnya Pandemi Covid-19 yang memakan ribuan bahkan jutaan nyawa umat manusia. Banyak sektor yang terdampak mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya akibat dari Pandemi Covid-19. Untuk mengatasi penyebaran virus yang mematikan ini berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk salah satunya penutupan aktivitas pariwisata. Semenjak kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah aktivitas pariwisata Bleberan sempat berhenti beroperasi selama tiga bulan. Penutupan aktivitas pariwisata ini berdampak langsung terhadap pendapatan BUM Desa Wisata Bleberan. Untuk diketahui bahwa pendapatan BUM Desa Wisata tergantung jumlah pengunjung yang masuk ke objek wisata Bleberan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim. (2015), “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. (2018), “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Bandung: PT Remadja Rosdakarya
- Nilamsari, N. (2014), “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, Jakarta: Wacana

Jurnal

- Ayuni, I. Chyntya dan Hidayat, Zainal. (2019), “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang”, *Jurnal UNDIP* Vol. 8 No. 2 Tahun 2019
- Alkadafi, M. (2014), “Pengutan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015”. *Jurnal El-Risyah*, 5(1), 32-40
- Alkadafi, M. Dkk, (2021), “Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau”, *PUBLIKA :Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.7, No.1 (2021)
- Amir Azhar, Dkk. (2020), “Identifikasi Potensi dan Status Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat”, *Journal of Regional and Rural Development Planning* (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan), Vol, 4, No. 2 Juni 2020
- Budiono, Pagu. (2015), “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)”. *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No.1 Januari-Maret 2015
- Chasanah, Dkk. (2017), “Implementasi Kebijakan Dana Desa”, *IJPA- The Indonesian Journal of PublicAdministration*, Vol. 3 No. 2 Desember 2017
- Daru, P. Nurhadi. (2020), ” Dampak Sosial Ekonomi Wisata Umbul Brintik Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten”. *Jurnal Enerisia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 1, Juni 2020

- Djaelani, Syafril, Dkk. (2020) "Pemasaran Tempat Wisata Janda Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Bedauh Barito Kuala", *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, Vol 1, No 1, Juli 2020
- Elsi D. Sutri, Dkk, (2020), "Inovasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Fokus penelitiannya terkait pengembangan BUMDesa", *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 11, Nomor 2, Oktober 2020
- Faradin Sefi dan Fanida, H. Eva. (2021), "Pengelolaan BUMDesa Tirta Abadi Melalui Strategi Pengembangan Agrowisata Kebun Blimbing Desa Ngringinrejo, Bonjonegro", *Publika*.Volume 9 Nomor 3 Tahun 2021
- Maitah, Itah. (2019), "Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran; *Dinamika; Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 3 September 2019.
- Hary, Hermawan. (2016), " Dampak Pengembangan Desa Wisata Ngalanggerang Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal", "*Jurnal Pariwisata*, Vol. 3 No. 2 September 2016
- Hasyim, M. Nanang. (2019), "Peningkatan Kemandirian Desa Panggunharjo Melalui Komunikasi Pembangunan", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*. Vol. 3, no. 2 (2019)
- Hilman A. Yusuf dan Nasution D. Robby. (2019), "Strategi Bumdes Dalam Penyelenggaraan Manajemen Aset Serta Pengembangan Komoditas Kepariwisata Di Desa Ponggok, Polan Harjo, Klaten", *Tourism Scientific Journal*, Vol. 5 No. 1 (2019)
- Irwandi, Dkk. (2019), "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi", *Jurnal Sains Sosio Humanior*, Vol.3 No.2 Desember 2019
- Ilyas. (2016), " Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling", *Jurnal Of Nonformal Educatio*, Vol. 2 No. (1)
- Laily, Purnawati. (2019), "Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Desa Waung (Studi Pada Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung", *Jurnal Publiciana*. Vol. 12, No. 1 2019
- Liow, H. Dkk, (2018). "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4 No. 61 Tahun 2018

- Muhammad, Afra dan Fatimatuzzahra. (2021), "Peran BUMDesa dan LPM Batu Kumbang Dalam Membranding Desa Wisata", *SASAK: DESAIN VISUAL DAN KOMUNIKASI*, Vol. 03. No.1 Mei 2021
- Nurmaulida, S. Abdullah. (2018), "Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang", *JURNAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. Volume 6 No.2 Tahun 2018
- Prantika, Asep. (2020) "Pengaruh Status Desa Wisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Ponggok", *Communnity Development Journal*, Vol.1, No. 2 Juni 2020
- Rini S. D. Wafia dan Tarigan I. Muhammad. (2020), "Pemanfaatan Wisata Mata Air yang Dikelola oleh BUMDES di Desa Belik", *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, Vol.1, No. 2 Tahun 2020
- Sumiasih Kadek. (2018), "Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7 No. 4 Desember 2018
- Setiawan, Doni, Dkk (2018), "Implementasi Kebijakan BUMDesa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah di Kecamatan Dendang, Bangka Blitung", *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018
- Sidik, Fajar. (2015), "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa", *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol.19 No.2 November 2015
- (2017), "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMdesa) : Unit Usaha, Pendapatan dan Inefisiensi", *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol. 5, No. 3, Agustus 2017
- Sumarjono. (2107), "Pelebagaan Pengembangan Desa Wisata Gunungkidul" *Laporan Akl Masyarakat Desa*, Yogyakarta
- Milik Desa "Sejahtera" Dalam Kapanewon Playen, Kabupaten , Sekolah Tinggi Pembangunan
- Zakaria, F. Dkk. (2014), "Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Teknik Pomits*, Vol. 3, No.2

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Permendesa No 4 Tahun 2015 Tentang BUM Desa. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa